



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI  
(STUDI KASUS DI SMA N 1 KEBUMEN TAHUN AJARAN 2018/2019)**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:  
Puput Apri Nur Setianingsih  
3401415030

**JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia ujian  
Skripsi Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 4 Juli 2019


Mengetahui,

Pembimbing Skripsi



Nurul Fatimah, S.Pd, M.Si  
NIP. 198304092006042004

Ketua Jurusan  
Sosiologi dan Antropologi



Kuncoro Bayu P. S.Ant, M.A  
NIP. 197706132005011002

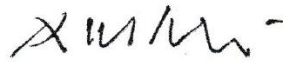
## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan  
Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji I



Dr. Totok Rochana, M.A  
NIP. 195811281985031002

Penguji II



Fulia Aji Gustaman S.Pd, M.A  
NIP. 198601132014041001

Penguji III



Nurul Fatimah, S.Pd, M.Si  
NIP. 198304092006042004



Mengetahui:  
Dekan,

Dr. Moh. Salehatul Mustofa, M.A  
NIP. 19630802 1988031001

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2019



Puput Apri Nur Setianingsih  
NIM. 3401415030

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

#### **DIMANA ADA KEMAUAN, DISITU PASTI ADA JALAN**

Setiap individu atau manusia tentunya mempunyai impian dalam hidup, apabila individu tersebut terbesit rasa mau dan bergerak mewujudkan impian hidupnya, maka setiap alur kehidupan yang ditempuh pasti akan selalu diberikan jalan oleh Allah SWT.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat terbaik mereka untuk anak-anaknya.
2. Kakak-kakakku serta keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat.

## SARI

**Setianingsih, Puput Apri Nur. 2019.** *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi (Studi Kasus di SMA N 1 Kebumen Tahun Ajaran 2018/2019)*. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Nurul Fatimah, S.Pd, M.Si. 112 halaman.

**Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Sistem Zonasi,**

SMA N 1 Kebumen merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Kebumen yang dikenal dengan sekolah unggulan. SMA N 1 Kebumen juga menjadi salah satu sekolah yang sudah menerapkan kebijakan sistem zonasi pada kegiatan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019. Sebelum penerapan kebijakan sistem zonasi, proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan pada hasil ujian nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a) bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA N 1 Kebumen tahun ajaran 2018/2019?; b) bagaimana dampak dari implementasi kebijakan sistem zonasi setelah PPDB di SMA N 1 Kebumen tahun ajaran 2018/2019?; c) bagaimana strategi sekolah dalam mengatasi dampak implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA N 1 Kebumen tahun ajaran 2018/2019?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipatoris, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pelaksanaan penelitian menggunakan tujuh orang informan utama penelitian yang terdiri dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, guru serta panitia PPDB dan lima orang informan pendukung yang terdiri dari siswa serta orangtua siswa.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa implementasi sistem zonasi pada PPDB tahun ajaran 2018/2019 di SMA N 1 Kebumen berjalan sesuai dengan peraturan Permendikbud dimana dalam kebijakan tersebut terdapat zona satu, zona dua, zona tiga. Dalam proses seleksi tidak berdasarkan pada hasil UN melainkan dengan zona atau wilayah dan dari berbagai kondisi sosial ekonomi yang beragam. Dampak penerapan kebijakan sistem zonasi dapat dirasakan oleh sekolah, guru, siswa, dalam proses pembelajaran dan panitia PPDB, serta orangtua siswa. Dampak tersebut berkaitan dengan penyesuaian diri karena mereka menjadi pihak pertama yang merasakan kebijakan sistem zonasi. Strategi sekolah dalam mengatasi masalah kebijakan sistem zonasi melalui PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah), Penerapan UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) dalam pembelajaran SKS (Sistem Kredit Semester), dan metode mengajar guru yang lebih bervariasi.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi sebagai upaya penting dalam pemahaman kebijakan sistem zonasi agar semua pihak dapat mengetahui dan memahami kebijakan tersebut. Memberikan pelayanan dalam hal pembelajaran oleh guru kepada setiap peserta didik. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

## ABSTRACT

**Setianingsih, Puput Apri Nur. 2019.** *Implementation of Zoning System Policy (Case Study SMA N 1 Kebumen in Academic Year 2018/2019)*. Final Project. Department of Sociology and Anthropology. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Mentor Nurul Fatimah, S.Pd, M. Si. 112 Pages.

***Keywords: Implementation, Policy, Zoning System***

SMA N 1 Kebumen is one of schools in Kebumen Regency which is known as prestigious school based on the result of national examination. SMA N 1 Kebumen is also one of schools that implements zoning system policy to the student admission system in academic year 2018/2019. Before implementing the zoning system policy, the student admission selection process was based on the result of national examination. The Formulations of the problem in this study are a) how is the implementation of the zoning system policy at SMA N 1 Kebumen academic year 2018/2019?; b) what is the impact of the implementation of after PPDB (Acceptance of New Students) zoning system policy at SMA N 1 Kebumen academic year 2018/2019?; c) What is the strategy of the school in overcoming the impact of the implementation of zoning system policy at SMA N 1 Kebumen academic year 2018/2019?.

This study used qualitative research method. The data collection techniques are non-participatory observation, deep interview and documentation. The study used seven main informants consisting of Deputy Principal of curriculum, teacher and PPDB committee and also five supporting informants consisting of students and parents.

The study found that the implementation of zoning system policy on PPDB 2018/2019 in SMA N 1 Kebumen ran in accordance with the regulation of Permendikbud which consists of three zones, there are zone one, zone two and zone three. The student admission process was not based on the result of national examination but based on the particular zones or regions and from various socio-economic background. The impact of the implementation of zoning system policy could be felt by the schools, teachers, student in the learning process, the committee of PPDB and also the parents. The impact of the policy related to students' self-adjustment because they were the first party who felt the zoning system policy. The school strategy in overcoming the problem of zoning system policy used PLS (Introduction of the School Environment), application of UKBM (Unit of Independent Learning Activities) in SKS (Semester Credit System) learning, and more varied teaching method.

This study suggests need to be socialization as an important effort in understanding the policy of the zoning system so that all parties know and understand the policy, to provide services in terms of learning to each student by the teachers, and to provide motivation to the students in order to improve their abilities and skills.

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi (Studi Kasus di SMA N 1 Kebumen Tahun Ajaran 2018/2019)”* yang disusun sebagai syarat untuk penyelesaian studi Strata Satu (S1).

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini telah mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan dengan rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kuncoro Bayu Prasetyo, S.Ant, M.A, Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mengarahkan penulis memperoleh dosen pembimbing sesuai dengan topik skripsi.
4. Nurul Fatimah, S.Pd, M.Si, Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang selalu memberikan semangat, doa, motivasi, bimbingan, dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.



5. Dr. Totok Rochana, M.A, Dosen Penguji 1 yang telah menguji dan memberikan masukan atau saran dalam skripsi ini.
6. Fulia Aji Gustaman, S.Pd, M.A, Dosen Penguji 2 yang telah menguji dan memberikan masukan atau saran dalam skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama penulis menimba ilmu.
8. Kepala SMA Negeri 1 Kebumen yang telah memberikan perizinan dan kesempatan untuk melakukan penelitian bagi penulis.
9. Keluarga besar SMA N 1 Kebumen yang telah memudahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna untuk berbagai pihak dalam sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2019



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SARI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Batasan Istilah.....	9
1. Strategi .....	9
2. Sistem Zonasi.....	9
3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Kajian Pustaka (Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan).....	11
1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dan PPDB <i>Online</i> .....	11

2.	Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi .....	14
3.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi .....	16
B.	Landasan Konseptual .....	20
1.	Konsep Kebijakan Sistem Zonasi .....	20
2.	Teori Difusi Inovasi .....	22
C.	Kerangka Berpikir .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Latar Penelitian .....	31
B.	Lokasi Penelitian .....	32
C.	Fokus Penelitian .....	32
D.	Sumber Data Penelitian .....	32
1.	Data Primer .....	33
2.	Data Sekunder .....	36
E.	Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	37
1.	Alat Pengumpulan Data .....	37
2.	Teknik Pengumpulan Data .....	37
F.	Uji Validitas Data .....	44
1.	Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara maupun sebaliknya .....	45
2.	Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan .....	46
G.	Teknik Analisis Data .....	47
1.	Reduksi Data/ <i>Data Reduction</i> .....	48
2.	Penyajian Data/ <i>Data Display</i> .....	49
3.	Verifikasi/ <i>Conclusion Drawing</i> .....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum SMA Negeri 1 Kebumen .....	51
1.	Profil Sekolah, Profil Guru, Profil Siswa, dan Profil Lulusan .....	51
2.	Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 1 Kebumen .....	59
3.	Struktur Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Kebumen .....	62
4.	Program Unggulan di SMA Negeri 1 Kebumen .....	65
5.	PPDB di SMA N 1 Kebumen Sebelum Kebijakan Sistem Zonasi .....	71
B.	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018/2019 .....	74

1. Persiapan PPDB Tahun Ajaran 2018/2019 .....	74
2. Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2018/2019.....	75
3. Penentuan Diterima dan Pemilihan Jurusan .....	77
C. Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Setelah Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 .....	81
1. Dampak Bagi Sekolah.....	81
2. Dampak Bagi Guru .....	85
3. Dampak Bagi Siswa .....	88
4. Dampak Bagi Orangtua/Wali Siswa .....	93
D. Strategi atau Upaya Sekolah dalam Mengatasi Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi .....	95
1. Program PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah).....	95
2. Penerapan UKBM dalam Pembelajaran SKS .....	100
3. Metode Mengajar Guru Lebih Bervariasi .....	101
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	106
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel Halaman

Tabel 1. Daftar Informan Utama.....	34
Tabel 2. Daftar Informan Pendukung.....	35
Tabel 3. Struktur Kurikulum SKS.....	63
Tabel 4. Persentase Siswa Kelas X Tahun Ajaran 2018/2019.....	78

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar Halaman

Gambar 1. Gedung SMA N 1 Kebumen .....	51
Gambar 2. Daftar Peserta Didik Tahun Ajaran 2018/2019.....	57
Gambar 3. Modul Pembelajaran UKBM .....	61
Gambar 4. Contoh Modul UKBM .....	64
Gambar 5. Program Unggulan SMA N 1 Kebumen .....	66
Gambar 6. Pojok Baca.....	69
Gambar 7. Sosialisasi Pendidikan Karakter .....	70
Gambar 8. Slogan Pendidikan Karakter.....	71
Gambar 9. Peserta Didik Kelas X .....	84
Gambar 10. Kegiatan Presentasi kelas X.....	92
Gambar 11. Pembelajaran dengan UKBM.....	100
Gambar 12. Kegiatan <i>Field Trip</i> oleh siswa .....	104
Gambar 13. Kegiatan belajar di Perpustakaan .....	105

## DAFTAR BAGAN

### Bagan Halaman

Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	29
Bagan 2. Triangulasi Data.....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran Halaman

Lampiran 1. Instrumen Penelitian .....	113
Lampiran 2. Pedoman Observasi .....	114
Lampiran 3. Pedoman Wawancara .....	115
Lampiran 4. Peraturan PPDB Tahun Ajaran 2018/2019.....	121
Lampiran 5. Data siswa kelas X Tahun Ajaran 2019/2019 .....	129
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	131



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial dan yang lainnya (Wulansari, 2016). Pelaksanaan proses pendidikan ini berguna untuk mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat (Lestari, 2017). Pendidikan juga menjadi bagian keseluruhan dari sebuah pembangunan. Proses pendidikan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pembangunan itu sendiri karena pendidikan adalah salah satu upaya yang penting dalam kemajuan sumber daya manusia (Wulandari, 2018).

Setiap individu dapat memanfaatkan layanan pendidikan tanpa harus melihat pada status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Semua mempunyai hak untuk merasakan pentingnya pendidikan sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan itu sendiri (Maryati dalam Akbar, 2018). Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembaruan sistem pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu melalui kebijakan untuk pemerataan

pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Kebijakan mengenai pendidikan ini sebenarnya sudah di jalan yang benar namun belum didukung oleh komitmen yang mengarah pada pengelolaan pendidikan berdasarkan asas pemerataan (Jubba, 2018). Pemerataan ini dapat dilihat dari berbagai kriteria, seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia (tenaga pendidik), jarak atau fasilitas transportasi dan lainnya.

Setiap kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah tentunya tidak lepas dari kata pro dan kontra serta selalu memunculkan suatu permasalahan. Seperti halnya kebijakan pendidikan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang juga disempurnakan sesuai dengan kondisi sekolah yang ada. Perbaikan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas. Terkait dengan sistem pendidikan, saat ini telah dilakukan pembaharuan yaitu dengan melakukan kebijakan sistem zonasi pada saat seleksi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sistem ini diterapkan dalam PPDB melalui mekanisme luar jejaring atau *offline* dan dalam jejaring atau *online* (Lestari, 2017). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dalam proses seleksi terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Sebelumnya sistem PPDB *online* merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi

seleksi penerimaan peserta didik baru dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi dengan melihat indikator yang digunakan adalah nilai akhir ujian nasional (Warsita, 2015). Kemudian dengan peraturan baru tentang PPDB indikator dalam proses penyeleksian bukanlah dilihat dari nilai akhir ujian nasional itu sendiri melainkan melalui sistem zona. Kebijakan sistem zonasi bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Purwanti, dkk. 2018).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru (Wulandari, 2018). Kemudian kebijakan sistem zonasi itu sendiri disempurnakan dalam pasal 16 Permendikbud No 14 Tahun 2018. Kemudian peraturan sistem zonasi tersebut ditetapkan untuk jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA (Husna dkk, 2018). Sedangkan untuk SMK dibebaskan untuk peraturan zonasi namun tetap menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi (Pasal 16 Permendikbud No 17 Tahun 2017). Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Tujuan dari sistem zonasi yaitu untuk pemerataan kualitas pendidikan untuk menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan (Wahyuni, 2018).

Dalam hal ini sekolah unggulan disinyalir menjadi prioritas utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa sekolah unggulan diperlakukan layaknya anak emas oleh dinas terkait (Bintoro, 2018). Hal tersebut dapat dilihat dari input sekolah unggulan yang terkenal dengan sejumlah prestasi. Selain itu juga dengan sistem zonasi ini semua masyarakat bisa mendapatkan layanan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik. Pada sistem zonasi sekolah tahun 2017 masih dalam tahap adaptasi sehingga dalam praktiknya belum semua sekolah menerapkan sistem ini.

Peraturan sistem zonasi sekolah yang tertera pada pasal 16 Permendikbud No 14 Tahun 2018 diterangkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat dari sekolah dengan kuota sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima (Husna dkk, 2018). Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Jarak zona terdekat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sekolah menyediakan kuota 10% dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau terjadi bencana (Wahyuni, 2018).

Dalam Permendikbud ini memang disebutkan bahwa seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA mempertimbangkan kriteria berdasarkan

ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas tersebut adalah jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi, usia, dan nilai UN, serta prestasi dibidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing (Wahyuni, 2018). Adanya penerapan sistem zonasi berangkat dari keberpihakan pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat. Dimana sistem ini diharapkan menghilangkan “kasta” dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Salah satu sekolah yang sudah menerapkan Permendikbud tersebut tentang PPDB sistem zonasi adalah SMA N 1 Kebumen. Sebelumnya SMA N 1 Kebumen dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem rayonisasi. Dimana dengan sistem rayon tersebut menggunakan sistem *online* dan calon peserta didik yang mendaftar terdiri dari cakupan wilayah yang lebih luas. Layanan penerimaan peserta didik sebagai permulaan dalam pelayanan mutu lembaga pendidikan menggunakan teknologi moderen salah satunya adalah penerimaan peserta didik baru dengan sistem *online* (Setiawan, 2016). Setelah itu pada tahun 2018 dalam penerimaan peserta didik baru di SMA N 1 Kebumen sudah menggunakan kebijakan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya penerimaan zonasi sekolah mendapatkan persoalan diantaranya kondisi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi terdiri dari lulusan sekolah yang lebih beragam dan untuk mereka membutuhkan penyesuaian diri yang kuat. Selama ini SMA N 1 Kebumen telah dikenal sebagai salah satu sekolah favorit yang menerima siswa baru berdasarkan hasil

ujian nasional, prestasi akademik, dan non-akademik, serta tes tertulis, namun sekarang aturan PPDB di SMA N 1 Kebumen sudah berdasarkan sistem zona.

Kebijakan zonasi sekolah menjadi salah satu kebijakan yang efektif dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tersebut (Sarafah, 2018). Dalam pemerataan pendidikan melalui penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat berjalan tanpa diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap calon peserta didik untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selain itu juga untuk menghilangkan adanya sekolah favorit atau sekolah anak pintar yang selalu menerima siswa pintar.

Setiap kebijakan pendidikan dalam proses penerapannya tidak lepas dari segala tantangan yang muncul diberbagai kalangan. Seperti dari adanya sistem zonasi ini bisa dilihat dalam peningkatan kualitas dari peserta didik yang dilakukan masing-masing sekolah itu sendiri dengan sumber daya manusia yang ada. Selain itu juga pasca PPDB peserta didik dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik sekolah yang diterimanya agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai harapan. Sekolah harus dapat menciptakan pembelajaran yang kompetitif dan kondusif demi terciptanya iklim pembelajaran yang baik (Sarafah, 2018).

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dalam kebijakan sistem zonasi ini membuat sekolah harus lebih siap ketika menerima kondisi peserta didik yang beragam, baik kondisi sosial ekonomi, maupun kemampuan berpikir. Walaupun hal tersebut belum ditemukan dalam suatu penelitian, namun seperti

dalam berita salah satunya yaitu detiknews.com yang diakses pada 25 Juni 2019 tentang dampak sistem zonasi PPDB yang diterapkan kemendikbud menunjukkan adanya sekolah yang masih belum siap dalam menerapkan kebijakan tersebut. Hal tersebut karena sekolah unggulan sudah terbiasa memberikan materi kepada siswa-siswa yang dianggap pintar dengan nilai tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang muncul maka peneliti akan melihat penerapan kebijakan sistem zonasi itu sendiri yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Studi Kasus di SMA N 1 Kebumen Tahun Ajaran 2018/2019”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi dalam PPDB maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA N 1 Kebumen tahun ajaran 2018/2019?
2. Bagaimana dampak penerapan sistem zonasi setelah PPDB di SMA N 1 Kebumen Tahun Ajaran 2018/2019?
3. Bagaimana strategi sekolah dalam mengatasi dampak penerapan kebijakan sistem zonasi di SMA N 1 Kebumen tahun ajaran 2018/2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA N 1 Kebumen tahun ajaran 2018/2019
2. Menjelaskan dampak penerapan kebijakan sistem zonasi setelah PPDB di SMA N 1 Kebumen Tahun Ajaran 2018/2019
3. Menjelaskan strategi sekolah dalam mengatasi dampak penerapan kebijakan sistem zonasi di SMA N 1 Kebumen tahun ajaran 2018/2019

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat:
  - a. Memperkuat khasanah keilmuan sosiologi dalam mengkaji bidang pendidikan atau masalah pendidikan.
  - b. Mengembangkan pengetahuan dalam berbagai pemecahan permasalahan pendidikan di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
  - a. Sekolah  
Memberikan upaya atau jalan keluar dalam permasalahan pendidikan terutama proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
  - b. Pendidik  
Memberikan pelayanan kepada peserta didik seperti dalam penentuan kriteria ketuntatan minimal (KKM) disesuaikan dengan kemampuan



peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri.

c. Peserta Didik

Memberikan motivasi atau semangat belajar untuk tetap melanjutkan pendidikan di sekolah yang diinginkan dan meningkatkan belajar walaupun dalam proses seleksi tidak diukur dengan kemampuan akademik sehingga dapat mencapai prestasi yang lebih baik.

d. Orangtua Peserta Didik

Memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anaknya untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.

## **E. Batasan Istilah**

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu diberikan penjelasan. Hal ini dilakukan dengan maksud menghindari kemungkinan terjadinya interpretasi makna yang salah dalam menggunakan istilah-istilah dalam penelitian.

### **1. Strategi**

Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerima kebijakan sistem zonasi, guru dalam kegiatan pembelajaran, dan peserta didik dalam proses belajar.

### **2. Sistem Zonasi**

Sistem zonasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu kebijakan yang mengharuskan sekolah untuk menerima calon peserta didik sesuai

dengan zonasi atau siswa yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah. Sistem zonasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik berdasarkan pada zona satu atau mereka yang alamatnya berdekatan dengan sekolah.

### **3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Dalam penelitian ini PPDB yang dimaksud yaitu proses calon peserta didik yang sudah diterima oleh satuan pendidikan tingkat SMA melalui kebijakan sistem zonasi. Dalam penelitian ini melihat implementasi kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru dan setelah PPDB selesai sampai pada pemilihan jurusan oleh peserta didik baru.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Kajian Pustaka (Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan)**

Kajian pustaka diperlukan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menghasilkan teori maupun konsep yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kajian. Kajian pustaka didapatkan dari artikel jurnal sebagai literatur untuk mempertajam analisis dengan membandingkan konsep-konsep dalam kajian penelitian serta data yang relevan dengan tema skripsi yang berjudul “Strategi Sekolah dalam Implementasi Sistem Zonasi Setelah Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA N 1 Kebumen Tahun Ajaran 2018/2019”. Maka peneliti memberikan kajian pustaka berdasarkan kajian-kajian dan penelitian terdahulu.

Kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini dapat dikategorikan menjadi beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

##### **1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dan PPDB *Online***

Bintoro (2018) yang menjelaskan bahwa PPDB pada tahun ajaran 2017/2018 sudah mulai menggunakan kebijakan sistem zonasi pada sekolah-sekolah tingkat SMA di Kota Samarinda. Tentunya penetapan kebijakan zonasi ini menuai pro-kontra dalam masyarakat. Beberapa daerah memprotes pemberlakuan kebijakan ini karena dianggap tidak sesuai dengan karakteristik daerah. Sedangkan dalam penentuan zona yang ditetapkan oleh Disdikbud Prov. Kaltim sudah melibatkan musyawarah atau

kelompok kerja kepala sekolah dan disesuaikan dengan daerah dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. Walaupun sudah dilakukan demikian namun hal tersebut masih menunjukkan adanya kekhawatiran akan tertutupnya kemungkinan untuk bersekolah di luar zonasi, karena kuota untuk calon peserta didik dalam zonasi cukup besar yaitu 90%. Sosialisasi kebijakan zonasi yang belum maksimal ini karena hanya dilaksanakan pada saat pelaksanaan pendaftaran saja. Selain itu juga adanya kekhawatiran standar pendidikan yang tidak merata karena di daerah khususnya Kota Samarinda masih banyak standar pendidikan yang masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Istiqomah (2018) menjelaskan tentang implementasi pelaksanaan penerimaan peserta didik (PPDB) sistem *online* di Kota Surakarta. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) *online* dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sudah mulai sejak tahun 2006 yang bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret sebagai penyedia ahli IT. Kemudian Peraturan mengenai pendidikan mengalami perkembangan sampai pada saat ini yaitu dengan menggunakan zonasi sebagaimana diatur dalam UU Permendikbud No 14 Tahun 2018 serta Peraturan Walikota. Hal tersebut melihat dengan adanya perkembangann teknologi yang semakin pesat sehingga hal tersebut juga akan mempunyai dampak positif dalam bidang pendidikan. Implementasi PPDB *online* dengan sistem zonasi terdapat beberapa tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, serta tahap pengawasan

dan evaluasi. Faktor pendukung dalam pelaksanaan PPDB *online* yaitu sumber daya yang mendukung serta sarana prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi PPDB *online* ini adalah waktu yang mendesak, kurangnya pengetahuan orangtua calon peserta didik terkait dengan zonasi, kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan PPDB *online*. Faktor tersebut menyebabkan munculnya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan PPDB *online*. Namun hal tersebut membuat masyarakat untuk tetap mencari informasi terkait PPDB *online* dengan zonasi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pendaftaran ke sekolah yang diinginkan.

Mira (2016) mendeskripsikan efektivitas penerimaan peserta didik baru secara *online* di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar yang dilihat dari pendekatan proses. Efektivitas proses PPDB *online* ini dilihat dari tiga indikator yaitu desentralisasi pengambilan keputusan, komunikasi vertikal dan horizontal serta organisasi dan bagian-bagian bekerja sama secara baik. Adanya komunikasi yang lancar antar pihak dinas dan sekolah sehingga dapat meminimalisir masalah yang terjadi. Pengambilan keputusan pada PPDB *online* tergolong keputusan terprogram karena pendaftar dinyatakan lulus seleksi melalui program *real time* pada portal PPDB. Sehingga terciptanya sikap transparansi dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar terhadap masyarakat.

## **2. Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi**

Wulandari (2018) menjelaskan tentang pengaruh kebijakan sistem zonasi terhadap prestasi peserta didik. Penerimaan peserta didik baru baru sekarang sudah dilaksanakan dengan proses seleksi. Urutan prioritas dalam sistem zonasi yaitu jarak tempat tinggal ke sekolah, usia, nilai hasil ujian sekolah, serta prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Peningkatan proses dan prestasi belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri dilihat dari kondisi dalam diri peserta didik itu sendiri, sedangkan faktor eksternal dilihat dari lingkungan sekitar peserta didik. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Ajaran 2017/2018. Hal tersebut dilihat dari semakin baik pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maka proses dan prestasi peserta didik juga akan semakin baik.

Abidin dan Asrori (2018) mengkaji mengenai prosedur penerimaan siswa di sekolah kawasan berbasis zonasi, implementasi pendidikan karakter dan peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya. Sistem zonasi yang diterapkan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penerapan pendidikan karakter dilakukan dengan langkah mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran seperti

Pendidikan Agama Islam. Selain itu juga terdapat lima metode pendidikan karakter yang diterapkan yaitu mengajarkan, keteladanan, menentukan prioritas, praktis dan refleksi yang dapat dilakukan oleh guru maupun peserta didik. Pendidikan karakter dapat dilihat dari hal yang sederhana seperti cara berpakaian sampai pada sikap siswa terhadap peraturan sekolah. Sehingga sekolah tersebut sudah berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya.

Andina (2017) mengkaji tentang dampak psikososial bagi peserta didik dalam penerapan kebijakan sistem zonasi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa terdapat keuntungan dan permasalahan dalam kebijakan sistem zonasi itu sendiri. Keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun calon peserta didik tersebut salah satunya yaitu jarak tempat tinggal dekat dengan sekolah akan memudahkan peserta didik mendaftar tanpa menggunakan nilai UN. Sedangkan permasalahan yang muncul salah satunya adalah calon peserta didik yang berprestasi didorong untuk mendaftar pada sekolah yang terdekat meskipun bukan sekolah dengan memiliki kualitas tinggi. Selain itu dampak psikososial yang ditimbulkan akibat sistem zonasi ini adalah akan mengakibatkan berkumpulnya peserta didik dengan kemampuan beragam dalam satu rombel atau satu kelas. Mereka yang tidak berprestasi dan yang berprestasi menjadi satu kelas atau perlu adanya adaptasi dari masing-masing siswa. Hal ini akan mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Prestasi dapat ditimbulkan tidak hanya bergantung pada dirinya saja, namun juga

dipengaruhi lingkungan sekitar. Sehingga dalam proses belajar mereka harus sesuai dengan kemampuannya. Apabila tidak sesuai dengan kemampuannya maka mereka akan menjadi kurang berprestasi dan tertinggal oleh peserta didik yang lain. Oleh karena itu untuk mendukung prestasi peserta didik maka faktor lingkungan dan personal diatas perlu dikelola dengan baik.

### **3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dan PPDB *Online***

Dewi dan Septiana (2018) menjelaskan tentang evaluasi penerimaan peserta didik baru dengan menerapkan sistem zonasi sekolah pada tahun 2018. Penerapan kebijakan sistem zonasi tersebut untuk memastikan akses layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik untuk membawa lingkungan sekolah lebih dekat dengan keluarga, menghilangkan eksklusivitas (dibeda-bedakan) dan diskriminasi dalam lingkungan sekolah. Sehingga semua siswa dapat merasakan sekolah tanpa ada kendala. Namun dalam penerapan sistem zonasi ini masih terdapat berbagai kelemahan yang menyebabkan berbagai praktik penipuan sehingga membahayakan siswa dan orangtua. Kelemahan tersebut salah satunya adalah bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus menerima calon peserta didik yang berdomisili di radius terdekat sehingga menutup kemungkinan untuk peserta didik yang berprestasi tetapi berada di luar domisili tidak bisa diterima di sekolah tersebut.



Latri (2017) bertujuan untuk mengetahui program PPDB dengan sistem RTO (*Real Time Online*) di SMA N 2 Bantul dan upaya sekolah dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program PPDB tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa program tersebut relevan dengan kondisi sekolah dan masyarakat saat ini. Tujuan sekolah menerapkan sistem RTO yaitu untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat akan layanan yang mudah, cepat, transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kemampuan sekolah dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Panitia yang dibutuhkan lebih sedikit dan panitia diberi sosialisasi dan pelatihan terkait program. Sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersedia cukup memadai dengan kondisi yang siap pakai dan siswa yang diterima memiliki nilai tinggi. PPDB dengan sistem RTO lebih mudah dan transparan dalam proses pendaftaran, seleksi dan pengawasannya serta lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian tugas. Sehingga sekolah mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kewenangannya dan dapat menyeleksi calon peserta didik dengan baik. Penerapan sistem RTO memang memberikan hasil yang maksimal bagi sekolah tersebut karena siswa-siswa yang diterima memiliki nilai yang tinggi.

(Mutiarin, 2017) menjelaskan evaluasi mengenai penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem *online*. Dalam hal ini dengan adanya penggunaan sistem *online* berguna untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan perkembangan pendidikan itu sendiri. Sistem

informasi aplikasi pendidikan pada penerimaan peserta didik baru memang masih mengalami permasalahan. Pasalnya sebelum sistem ini diterapkan, penyelenggaraan proses PPDB masih berjalan secara manual, sehingga mengakibatkan kondisi masyarakat yang memang terbiasa dengan budaya lama. Masyarakat dalam hal ini adalah orangtua calon peserta didik yang masih belum memiliki kesiapan untuk mengikuti sistem baru. Tujuan dari evaluasi program tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan dimana selalu memperhatikan elemen masyarakat yang bersangkutan. Dengan menerapkan PPDB sistem *online* ini tentunya juga akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam peningkatan mutu pendidikan.

Dasuha (2016) mengkaji tentang kinerja pelaksanaan kebijakan peserta didik baru *online* dan mengetahui faktor yang menghambat implementasi kebijakan PPDB di Salatiga. Kebijakan PPDB dan implementasi kegiatan yang diterapkan secara umum telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang belum dapat diatasi adalah mengenai penyelewengan rombel dan sekolah swasta yang belum disediakan ruang dalam PPDB *online*. Faktor penghambat implementasi adalah kurangnya kontrol pemegang kebijakan kepada objek kebijakan sehingga muncul permasalahan tersebut. Strategi kebijakan implementasi yang dimunculkan dari penelitian ini adalah perlunya menjalankan PPDB *online* untuk semua sekolah baik negeri maupun swasta serta perlunya

kontrol dengan melakukan *crosscheck* setelah PPDB *online* dilakukan pada setiap sekolah. Karena tujuan dari kebijakan itu sendiri dibuat dengan melibatkan sekolah dan publik, sehingga sekolah mengetahui latar belakang yang didasari oleh permasalahan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Gantang (2016) menjelaskan bagaimana evaluasi dari peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru *online* di SMA Negeri Tuntang. Dalam pelaksanaan PPDB lebih berfokus pada pengetahuan calon peserta didik dimana banyak dari mereka belum mengetahui bagaimana peraturan menggunakan sistem *online*. Peserta didik juga dengan antusias mengikuti segala yang disediakan oleh sekolah. Dalam perkembangan dunia pendidikan proses mendaftarpun semakin ketat namun juga efektif. Hal ini sangat menunjang segala kegiatan sehingga memudahkan calon peserta didik baru dalam proses pendaftaran dan juga sekolah dalam melakukan seleksi.

Dengan adanya penelitian yang sudah dilaksanakan atau kajian pustaka tersebut juga akan membedakan penelitian terdahulu. Dalam hal ini penelitian terdahulu lebih melihat pada penerapan atau implementasi kebijakan sistem zonasi itu sendiri atau pada sistem *online* dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta dampak yang muncul dan dirasakan oleh berbagai pihak baik masyarakat dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan sudah melihat pada strategi atau upaya dari sekolah untuk

peserta didik maupun guru dalam penerapan kebijakan sistem zonasi setelah PPDB atau setelah siswa diterima di sekolah tertentu. Jadi kajian pustaka tersebutlah yang membedakan penelitian yang akan dilaksanakan guna memperoleh hasil yang maksimal.

## **B. Landasan Konseptual**

### **1. Konsep Kebijakan Sistem Zonasi**

Kebijakan sistem zonasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yaitu No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya yaitu No 17 Tahun 2017 karena dianggap kurang sesuai. Sistem zonasi ini sudah mulai diterapkan tahun 2017 pada sekolah baik tingkat SD maupun SMA. Kemudian banyak sekolah-sekolah favorit yang berada di daerah tertentu seperti pusat kota. Untuk itu dengan adanya sekolah favorit tersebut pemerintah memberlakukan peraturan sistem zonasi untuk sekolah tingkat TK sampai SMA atau sederajat.

Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang sistem zonasi sendiri dalam Pasal 16 No 14 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- b. Domisili calon peserta didik tersebut diatas berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- c. Penetapan radius zona terdekat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut.
- d. Dalam menetapkan radius zona di atas Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah dan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.
- e. Selain melalui zona terdekat, calon peserta didik juga dapat mendaftar melalui jalur prestasi bagi mereka yang diluar zona tersebut sebanyak 5% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- f. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Jadi sistem zonasi yang sudah diterapkan diberbagai daerah berdasarkan pada Permendikbud dan Peraturan Daerah masing-masing.

## 2. Teori Difusi Inovasi dalam Pendidikan

Menurut Rogers dan Soemakers (1971), difusi adalah proses dimana penemuan baru disebarkan kepada masyarakat yang menjadi anggota sistem sosial (Nuruddin, 2015:188). Sedangkan menurut Rogers (1983) dalam Morissan (2013), inovasi adalah “*an idea, practice, or object perceived as new by the individual*” atau suatu gagasan, praktik atau benda yang dianggap baru dan dipahami oleh individu. Inovasi merupakan suatu ide yang dianggap baru oleh individu seperti dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, inovasi lebih mengarah pada pendidikan yang berkaitan dengan kebijakan baru. Kebijakan tersebut yaitu sistem zonasi sebagai proses seleksi calon peserta didik baru.

Dalam teori difusi terdapat proses penerimaan dimana beberapa individu akan menerima suatu inovasi begitu mereka mengetahuinya. Sementara itu terdapat individu-individu yang menolah adanya inovasi tersebut dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencoba sesuatu yang baru (Morissan, 2013:141). Proses adopsi itu sendiri merupakan proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar hal baru sampai orang tersebut menerima. Penerimaan inovasi dalam difusi juga terjadi secara cepat dan lambat bergantung dengan individu yang menerimanya.

Proses diterimanya inovasi biasanya lebih mudah terjadi pada mereka yang terbuka terhadap perubahan, menghargai kebutuhan akan informasi dan selalu mencari informasi karena bagi mereka perubahan

tersebut penting dalam perkembangan zaman (Daryanto, 2014). Inovasi yang dirasakan akan memainkan peran penting, demikian pula dengan norma dan nilai yang berlaku dalam sistem sosialnya. Proses penerimaan inovasi akan memberikan konsekuensi seperti berhenti menggunakan inovasi tersebut apabila tidak sesuai dengan struktur hubungan sosial yang ada (Daryanto, 2014).

Sedangkan Rogers (1962) dalam Morissan (2013:148) mengemukakan adanya empat tahapan penting yang menjadi inti proses difusi yaitu sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Kesadaran individu akan adanya difusi dan adanya pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Hal tersebut didapatkan melalui suatu komunikasi baik media massa maupun hubungan interpersonal.

b. Pengimbauan atau Persuasi

Proses difusi terjadi di dalam pikiran calon penerima inovasi yang akan mempertimbangkan keuntungan yang akan diberikan inovasi kepada dirinya. Hal tersebut berdasarkan pada evaluasi dan diskusi dengan orang lain yang menjadi dasar penerimaan inovasi atau penolakan inovasi.

c. Keputusan

Individu terlibat dalam aktifitas yang membawa pada suatu pilihan mengadopsi atau menolak difusi, keputusan ini bersifat tidak dapat diubah.

d. Konfirmasi atau Penegasan

Individu akan mencari pendapat yang menguatkan keputusan-keputusan yang telah diambilnya, namun dia dapat berubah dari keputusan yang telah diambil sebelumnya jika pesan mengenai inovasi tersebut berlawanan satu dengan yang lainnya.

Rogers dalam Morissan (2013:143) menggolongkan lima tipe penerima inovasi berdasarkan keinovatifannya yang dijelaskan sebagai berikut:

a. *Innovator*

*Innovator* merupakan golongan yang selalu merintis, mencoba dan menerapkan teknologi baru dalam pertanian dan mampu mengajak individu lain untuk ikut dalam penyuluhan. Inovator mempunyai sifat selalu ingin tahu, ingin mencoba, ingin mengadakan kontak dengan para ahli untuk memperoleh informasi baru. Golongan inovator termasuk dalam berusaha berada dengan kepemilikan lahan lebih luas dari pengusaha lain.

b. Penerima Awal

Golongan pelopor atau *early adopter* merupakan golongan yang mengusahakan sendiri pembaharuan teknologi dan lebih



meyakini adanya agen pembaharu (penyuluh). Penerima awal terdiri atas orang-orang terpandang, dihormati, dan disegani di lingkungan lokal mereka karena keberhasilan mereka di berbagai bidang.

c. Mayoritas Awal

Kategori penerima ini mencakup orang-orang yang tidak ingin menjadi yang pertama dalam menerima gagasan atau teknologi baru. Mereka lebih suka membahasnya terlebih dahulu dalam waktu yang cukup lama, sebelum anggota membuat keputusan untuk menerimanya. Kelompok ini mempunyai fungsi penting untuk mengesahkan suatu inovasi atau untuk menunjukkan kepada anggota komunitas lainnya bahwa inovasi yang diperkenalkan memang berguna dan penerimanya memang diperlukan (Rogers, 1955).

d. Mayoritas Terlambat

Penganut lambat adalah orang-orang yang konservatif pragmatis yang sangat membenci risiko serta tidak nyaman dengan ide baru sehingga mereka belakangan mendapatkan inovasi setelah mereka mendapatkan contoh. Biasanya penganut ini lebih berhati-hati dalam menilai manfaat penerimaan suatu inovasi.

e. Kelompok Tertinggal

Kelompok ini adalah golongan akhir yang memandang inovasi atau sebuah perubahan tingkah laku sebagai sesuatu yang memiliki risiko tinggi. Kelompok terikat dengan masa lalu yaitu

pada cara tradisional dalam melakukan sesuatu dan mereka enggan untuk melakukan sesuatu yang baru.

Proses inovasi dapat berkembang dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi dimulai dari sadar akan munculnya inovasi sampai menerapkan inovasi tersebut (Yani, 2012). Proses inovasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan secara bertahap akan mengalami perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu berakhir. Menurut Rogers (1962) terdapat beberapa model proses inovasi yang berorientasi pada individu yaitu menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima atau adopsi (Yani, 2012). Sedangkan proses inovasi yang mengarah pada organisasi (Rogers, 1983 dalam Yani, 2012) adalah sebagai berikut:

1. Inisiasi (permulaan) adalah kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi, dan semua diarahkan untuk menerima inovasi.
2. Agenda *setting* adalah semua permasalahan umum organisasi dirumuskan guna menentukan kebutuhan inovasi, dan diadakan studi lingkungan untuk menentukan nilai potensial inovasi bagi organisasi tersebut.

3. Penyesuaian adalah diadakan penyesuaian antara masalah dengan inovasi yang akan digunakan, kemudian direncanakan dan dibuat desain penerapan inovasi dengan masalah yang dihadapi.
4. Redefinisi dalam implementasi adalah Inovasi dimodifikasi dengan situasi dan masalah organisasi. Struktur organisasi disesuaikan dengan inovasi yang telah dimodifikasi agar menunjang inovasi.
5. Klarifikasi adalah hubungan antara inovasi dan organisasi dirumuskan dengan sejelas-jelasnya sehingga inovasi benar-benar dapat diterapkan sesuai yang diharapkan.
6. Rutinisasi adalah inovasi kemungkinan telah kehilangan sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari rutin organisasi.

Dalam proses difusi terdapat hal-hal yang berkaitan yaitu inovasi, komunikasi, masyarakat, dan waktu. Dasar dipilihnya teori difusi inovasi dalam dalam penelitian ini adalah dalam teori difusi inovasi terdapat sebuah ide, gagasan yang kemudian dikomunikasikan melalui saluran dan dalam jangka waktu tertentu.

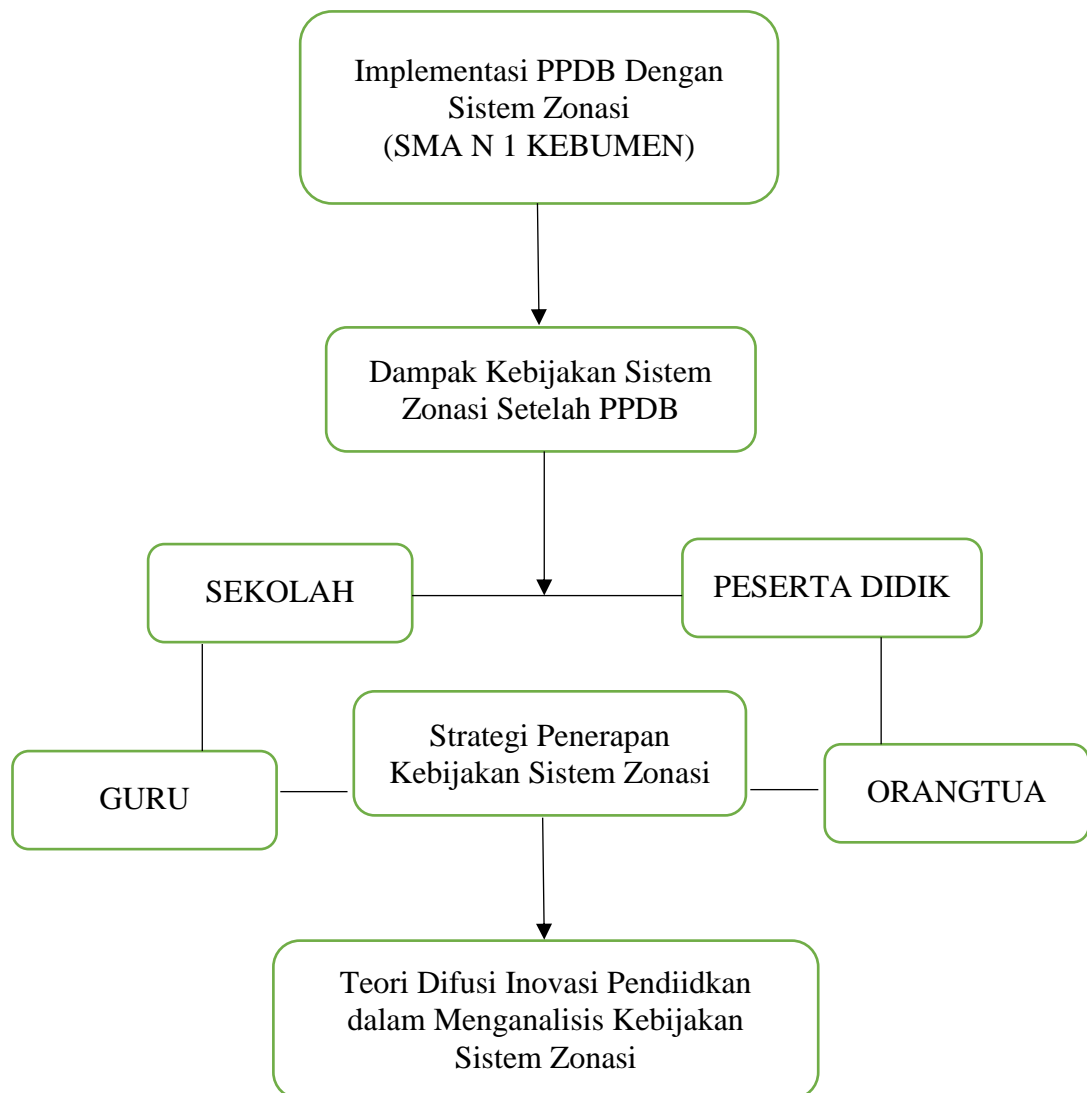
Teori difusi inovasi yang merupakan sebuah gagasan yang dapat merubah suatu masyarakat dapat dilihat dari kebijakan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan sistem zonasi tersebut merupakan sebuah gagasan atau ide dari pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu untuk kemudian diterapkan oleh lembaga sosial formal. Dengan waktu yang terus menerus adanya sosialisasi oleh semua pihak maka sekolah tersebut akan memahami

kebijakan tersebut. Tujuan dari kebijakan sistem zonasi sendiri yaitu untuk pemerataan pendidikan dimana sekolah mempunyai kualitas yang sama dan tidak ada sekolah unggulan, dalam hal ini semua sekolah mempunyai keunggulan masing-masing.

Dalam hal ini peraturan sistem zonasi direncanakan oleh pemerintah dan untuk kemudian diterapkan dengan sengaja oleh sekolah dengan tujuan pemerataan pendidikan. Kebijakan sistem zonasi merupakan salah satu upaya perubahan sosial dalam bidang pendidikan agar dapat dirasakan oleh semua kalangan dan dapat bersekolah di sekolah yang kualitasnya sama. Dalam sistem zonasi yang diterapkan oleh sekolah melihat bahwa proses penerimaan peserta didik baru tidak diukur dengan hasil nilai UN melainkan dengan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dipilihnya. Penerapan tersebut dilakukan baik di sekolah tingkat dasar sampai SMA. Penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa penerapan kebijakan zonasi sudah sesuai dengan tujuan pendidikan dalam hal pemerataan yang dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan untuk menjelaskan alur pikir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka teori, sehingga fokus penelitian ini dapat disimpulkan dan dipahami. Berikut merupakan bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Bagan 1. Bagan Kerangka Berpikir  
(Sumber: Pengolahan Data Primer)

Kerangka berpikir di atas menjelaskan adanya peraturan pemerintah terkait dengan PPDB yang sesuai dengan tujuan Sistem Pendidikan Nasional dimana seluruh masyarakat berhak menerima pendidikan tanpa terkecuali. Kemudian untuk mengatasi adanya permasalahan tersebut dan dapat mencapai tujuan pendidikan munculah sebuah kebijakan yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi ini dianggap telah mengatasi adanya ketidakadilan dalam dunia pendidikan dimana adanya dikotomi antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran.

Dari kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa di SMA N 1 Kebumen menjadi salah satu sekolah yang sudah menerapkan kebijakan sistem zonasi. Dalam hal ini sekolah tidak menerima siswa berdasarkan nilai hasil UN saja, tetapi juga berdasarkan jarak alamat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Namun penerapan sistem zonasi tentunya tidak lepas dari adanya permasalahan baik dari sekolah maupun peserta didik itu sendiri baik dalam proses PPDB maupun pasca PPDB.

Kebijakan sistem zonasi merupakan suatu kebijakan terkait dengan PPDB dimana syarat diterima calon peserta didik berdasarkan pada zona (jarak). Penerapan kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan sekolah berusaha membuat peserta didiknya mempunyai kualitas yang sama. Dalam penelitian ini akan melihat penerapan kebijakan sistem zonasi, dampak yang dirasakan oleh sekolah, guru, siswa, maupun orangtua siswa. Kemudian penerapan kebijakan sistem zonasi akan dianalisis menggunakan teori difusi inovasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan kebijakan sistem zonasi di sekolah unggulan bahwa SMA N 1 Kebumen merupakan salah satu sekolah yang sudah dikenal dengan sekolah favorit. Dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 SMA N 1 Kebumen telah menerapkan kebijakan sistem zonasi sebagai persyaratan untuk calon peserta didik yang mendaftar di sekolah tersebut. Dalam penerapannya calon peserta didik yang mendaftar terdiri dari berbagai kalangan dan karakteristik yang beragam baik segi kognitif maupun keterampilan. Kebijakan sistem zonasi sebagai salah satu upaya dari pemerintah dalam proses pemerataan pendidikan. Dalam realitasnya masih banyak sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah unggulan dan favorit serta sekolah pinggiran. Adanya kebijakan sistem zonasi tersebut untuk menghapus dikotomi atau kasta dalam pendidikan.

Kebijakan sistem zonasi menjadi salah satu bentuk inovasi dalam dunia pendidikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Rogers (1965) bahwa inovasi tersebut kemudian dikomunikasikan kepada anggota masyarakat dalam sistem sosial. Dalam proses difusi terdapat hal-hal yang berkaitan yaitu inovasi itu sendiri, komunikasi antar sesama, adanya masyarakat atau komunitas, dan adanya elemen waktu. Kebijakan sistem zonasi diterima sebagai suatu inovasi yang dalam proses persebarannya

diterima oleh sekolah dan diterapkan dalam waktu tertentu yaitu pada saat seleksi calon peserta didik baru. Perlu adanya sebuah penyesuaian baik dari sekolah maupun masyarakat untuk dapat menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan harapan yang di inginkan. Disini penerapan kebijakan sistem zonasi menuai segala permasalahan yang muncul baik dari proses seleksi maupun setelah siswa diterima di sekolah tertentu.

1. Implementasi sistem zonasi di SMA N 1 Kebumen berjalan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Permendikbud. Dimana dalam proses seleksi calon peserta didik baru dasar persyaratan yang paling utama adalah dengan zona atau tempat tinggal yang tercantum dalam KK. Dalam kebijakan sistem zonasi terdiri dari tiga zona, zona satu meliputi Kecamatan Kebumen, Alian, Kutowinangun, Buluspesantren, Kec Klirong. Zona dua terdiri dari Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Pejagoan, Gombong, dan Karanganyar. Zona tiga terdiri dari wilayah yang berada di luar Kabupaten Kebumen.
2. Dampak implementasi sistem zonasi dirasakan oleh sekolah, guru, panitia PPDB, peserta didik dan orangtua siswa. SMA N 1 Kebumen yang sudah terbiasa dengan kondisi siswa dari kalangan menengah ke atas dan dari pengetahuan yang tinggi membutuhkan penyesuaian terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi. Salah satu dampak bagi sekolah yaitu minat masyarakat yang mendaftar di SMA N 1 Kebumen semakin meningkat dari berbagai kalangan. Pasalnya siswa



yang diterima lebih heterogen apalagi jika dilihat dari kemampuan kognitif siswa. Guru juga membutuhkan upaya yang lebih keras dalam mengajar karena di dalam kelas akan merasakan perbedaan proses mengajar. Sedangkan untuk siswa juga membutuhkan adaptasi, proses penyesuaian diri, mental yang kuat apabila dirinya berasal dari lulusan sekolah swasta atau pinggiran dan diterima di sekolah yang dikenal dengan sekolah unggulan. Untuk wali siswa atau orangtua juga berharap yang terbaik untuk anak-anaknya agar bisa sesuai dengan keadaan sosial ekonomi dan kemampuan dalam belajar.

3. Strategi atau upaya sekolah dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dapat dilihat dari program PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) yang dilakukan oleh OSIS kepada peserta didik baru dalam pengenalan SMA N 1 Kebumen agar lebih mengetahui dan juga dapat beradaptasi dengan sekolah unggulan. Untuk upaya guru dapat dilakukan dengan metode belajar yang berbeda. Salah satunya pada program *field trip* yang bersifat wajib bagi kelas X dan dapat dilaksanakan untuk semua siswa. Kegiatan tersebut membawa manfaat dan semangat baru untuk siswa agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kebijakan sistem zonasi di sekolah unggulan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk sekolah sebagai kebijakan baru dalam dunia pendidikan perlu adanya sosialisasi oleh sekolah kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi upaya penting dalam mengenalkan dan memahami suatu kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang sudah ditetapkan.
2. Untuk guru memberikan pelayanan seperti dalam penentuan kriteria ketuntatan minimal (KKM) disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri.
3. Untuk peserta didik dapat meningkatkan belajar walaupun dalam proses seleksi tidak diukur dengan kemampuan akademik.
4. Untuk orangtua peserta didik dapat memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anaknya untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainal dan Asrori. 2018. Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7. No. 1
- Akbar, Fazil, dkk. 2018. Pemilihan Layanan Satuan Pendidikan SMP oleh Pelajar Yang Berdomisili di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Buana*. Vol. 2. No. 3. Hal. 882-892
- Andina, Elga. 2017. Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Dalam Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. IX. No. 14
- Bintoro, Ratih Fenty A. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018. *Jurnal Riset Pembangunan*. Vol. 1. No. 1. Hal. 48-57
- Daryanto. 2014. *Teori Komunikasi*. Malang: Gunung Samudera
- Dasuha, Obaja Frando. 2016. Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Online Di Salatiga. Tesis. Salatiga: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana
- Dewi, Kiki Engga, dan Septiana, Ririn. 2018. Evaluation of Zoning Student Recruitment System in Year 2018. Dalam Prosiding Seminar Internasional Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
- Henslin dalam Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Husna, Nirma Qolby Nisaul dkk. 2018. Analisis Persebaran Asal Siswa Favorit di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Indrawatik, Rita, dkk. 2013. Eksklusifitas Siswa (Studi Fenomenologi Konstruksi Sosial Pola Eksklusifitas Siswa Pada Kelas Unggulan Di SMA Muhammadiyah 1 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012). *Jurnal Analisa Sosiologi*. Hal. 51-61
- Istiqomah, Rizlaili dkk. 2018. Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 4 No. 1

- Jubba, Hasse dan Pabbajah, Mustaqim. 2018. Politik Pendidikan Indonesia: Ketimpangan dan Tuntutan Pemenuhan Kualitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol. X. No. 1. Hal. 49-60
- Latri, Wulan. 2017. Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Real Time Online (Rto) di SMA Negeri 2 Bantul. *Jurnal Hanta Widya*. Vol. 5. No. 9. Hal. 22-27
- Lestari, Herman Aprilia. 2017. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. Surabaya: Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya
- Marthunis. 2017. Sekolah Unggulan Disparitas Dalam Pendidikan. Dari <http://mediaindonesia.com/newa/read/88786/sekolah-unggulan-disparitas-dalam-pendidikan/2019-01-15>, diakses pada 15 Januari 2019
- Mutiarin, Diyah, and Junior Hendri Wijaya. 2017. "Evaluasi Penerapan SIAP PPDB Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*. Vol. 21. No. 2. Hal. 83-99
- Mira, Nur Anna. 2016. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Skripsi. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin
- Nuruddin. 2015. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja
- Pasaribu, Johnii S. 2017. Penerapan Framework YII Pada Pembangunan Sistem PPDB SMP BPPI Baleendah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*. Vol. III. No. 2. Hal. 154-163
- Purwanti, Dian dkk. 2018. Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. Bandung: FISIP Universitas Padjajaran
- Rogers dalam Morissan, 2015. *Teori Komunikasi Massa (Media, Budaya, dan Masyarakat)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Romanda, Gantang Febry. 2016. Evaluasi Kesiapan Peserta Didik Mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Online di SMA Negeri 1 Tuntang. Artikel Ilmiah. Universitas Kristen Satya Wacana
- Sapsuha, Tahir, 2013. *Pendidikan Pascakonflik: Pendidikan Multikultural Berbasis Konseling Budaya Masyarakat Maluku Utara*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang

- Sarafah, Azizah Arifinna. 2018. Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Lentera Pendidikan*. Vol. 21. No. 2. Hal. 206-213
- Setiawan, Dedi. 2016. Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem Real Time Online (RTO) Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016. *Jurnal Hanata Widya*. Hal. 16-31
- Sitokdana, Melkior dkk. 2016. Strategi Pembangunan E-Culture Di Indonesia. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*. Vol. 2. No. 2. Hal. 123-139
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahyuni, Dinar. 2018. Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018/2019. Dalam Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. X. No. 14 Hal. 13-18
- Warsita, Bambang. 2015. Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Kwangsan*. Vol. 3. No. 1. Hal. 27-44
- Wulandari, Desi. 2018. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol. 5. No. 9
- Wulansari, Devi. 2016. Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMKN 1 Cangkringan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. Edisi 6. Vol. V. Hal. 640-650
- Yani, Asep Tapip. 2012. *Pembaharuan Pendidikan*. Bandung: Humaniora
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2018
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 17 Tahun 2017
- <http://www.detik.com/news/pro-kontra-sekolah-berdasarkan-kebijakan-sistem-zonasi-setuju-atau-tidak?>. Oleh Danu Damarjati, Jumat 21 Juni 2019. Diakses pada 25 Juni 2019 pukul 11.30 WIB.